

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202426235, 22 Maret 2024

Pencipta

Nama : **Lestari Agusalim dan Yoga Setiawan**
Alamat : Jl. Babakan Lio RTRW 001/010 Kel. Balumbang Jaya, Bogor Barat - Kota, Bogor, Jawa Barat, 16116
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Lestari Agusalim dan Yoga Setiawan**
Alamat : Jl. Babakan Lio RTRW 001/010 Kel. Balumbang Jaya, Bogor Barat - Kota, Bogor, Jawa Barat, 16116
Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : **Karya Ilmiah**
Judul Ciptaan : **Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Ketimpangan Pendapatan: Studi Empiris Di Indonesia**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali : 22 Maret 2024, di Bogor - Bogor Barat
di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000601589

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.

Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Anggoro Dasananto
NIP. 196412081991031002

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

Covid-19, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pendapatan: Studi Empiris di Indonesia

Lestari Agusalim¹, Yoga Setiawan²

lestariagusalim@trilogi.ac.id, yogasetiawan718@gmail.com

^{1,2}Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Trilogi

Abstract

Ketimpangan pendapatan menjadi tantangan signifikan bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang berdampak secara disparatif pada kemakmuran masyarakat. Pertumbuhan ekonomi, sebuah indikator kunci dari kesejahteraan masyarakat, seharusnya idealnya disertai dengan distribusi pendapatan yang adil. Namun, ketika pertumbuhan ekonomi bertepatan dengan tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi, hal itu menandakan bahwa manfaat pertumbuhan tersebut didistribusikan secara tidak merata di seluruh masyarakat. Studi ini menyelidiki apakah ada disparitas dalam pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia sebelum dan selama pandemi Covid-19. Dengan menggunakan model efek acak dengan data selama 12 tahun (2010-2021), analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia, menantang hipotesis Kuznets. Investasi dalam negeri (DIN) juga tidak menunjukkan pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, indeks pembangunan manusia (HDI) menunjukkan dampak negatif yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan secara konsisten di kedua periode tersebut. Sementara itu, investasi langsung asing (FDI) berdampak positif terhadap ketimpangan pendapatan. Tidak ada perbedaan dalam pengaruh HDI dan FDI terhadap ketimpangan pendapatan baik sebelum maupun selama Covid-19. Oleh karena itu, meningkatkan kualitas sumber daya manusia muncul sebagai strategi yang layak untuk mengatasi ketimpangan pendapatan.

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Ketimpangan Pendapatan, Covid-19

PENDAHULUAN

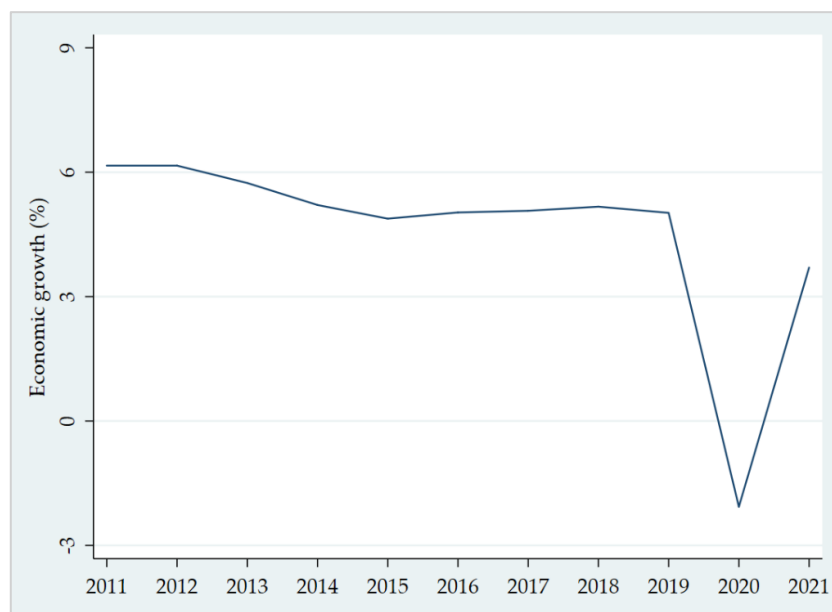
Distribusi kesejahteraan sosial yang merata dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang cepat, asumsi yang masih berlaku di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia. Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dapat diamati melalui kualitas pertumbuhan ekonomi yang dicapai (Hendarmin, 2019). Karakteristik pertumbuhan ekonomi di Indonesia ditandai oleh saling ketergantungan antar negara, dipengaruhi oleh hubungan diplomasi atau tren globalisasi global. Ketika satu negara mengalami krisis, negara lain juga akan merasakan dampaknya (Estuningtyas, 2018).

Upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi yang bertujuan mencapai *output* tambahan disebut sebagai pertumbuhan ekonomi. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi meliputi Produk Domestik Bruto (PDB) serta Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) suatu wilayah (Putri & Erita, 2019). Pertumbuhan ekonomi tidak dianggap sebagai gambaran ekonomi pada saat tertentu, tetapi sebagai suatu proses, memungkinkan pengamatan terhadap aspek dinamis suatu ekonomi (perkembangan atau perubahan dari waktu

ke waktu). Suatu ekonomi dianggap mengalami pertumbuhan ketika total hasil nyata dari faktor produksi dalam tahun tertentu lebih besar daripada tahun sebelumnya. Ini berarti bahwa pendapatan riil masyarakat dalam tahun tertentu lebih besar daripada pendapatan riil pada tahun sebelumnya (Assidikiyah *et al.*, 2021).

Pada awal tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pertumbuhan ekonomi global mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh wabah Covid-19, yang mempengaruhi dunia dan Indonesia (Indayani & Hartono, 2020). Penurunan periodik dalam ekonomi nasional pada kuartal kedua tahun 2020 adalah hasil dari kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di berbagai kota di Indonesia mulai April 2020 (Widiastuti, 2021).

Pada Gambar 1, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum Covid-19, dari tahun 2010 hingga 2019, cenderung menurun. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02. Pada tahun 2020, pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun bahkan lebih jauh menjadi -2,07. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi perlahan pulih menjadi 3,69. Pandemi Covid-19 memasuki Indonesia pada Maret 2020, dan hingga saat ini, telah tercatat 4,90 juta kasus Covid-19 di Indonesia. Keberadaan kasus Covid-19 telah menyebabkan penurunan drastis dalam pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020, menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.



Sumber: BPS-Statistik Indonesia, 2023 (diolah)

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

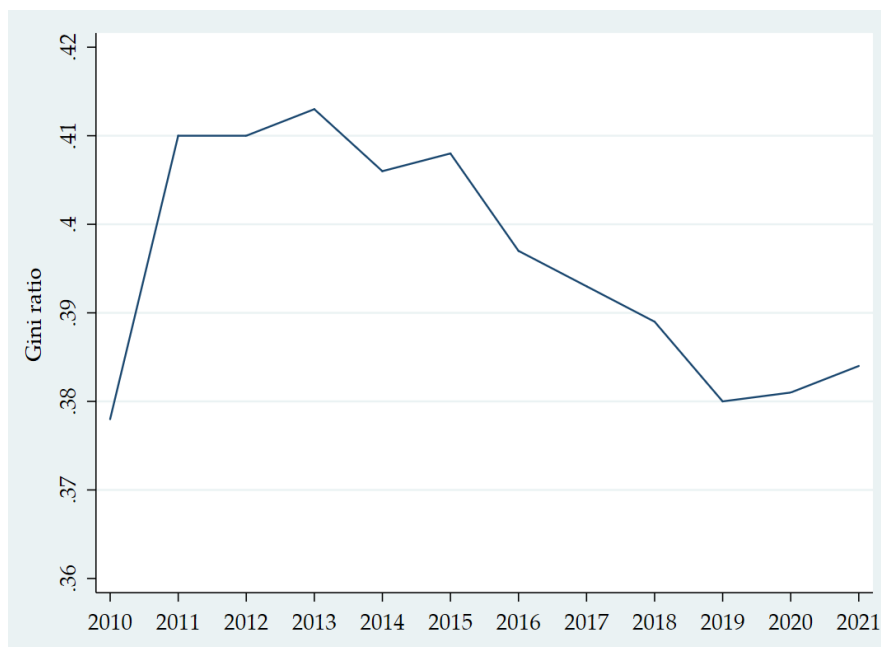
Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi karena peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan meningkatkan pendapatan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki efek trickle-down pada ekonomi suatu wilayah (Indrawati *et al.*, 2020). Namun, efek trickle-down tidak selalu terwujud. Hasil penelitian Azwar dan Subekan (2016) menunjukkan bahwa sebagian besar pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak langsung mencapai segmen ekonomi yang lemah. Ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi tidak inklusif, akhirnya menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan yang semakin memburuk. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode Covid-19, yang dimulai pada awal 2020, mengalami penurunan

drastis, terutama di Provinsi Bali, yang merupakan provinsi yang paling terpengaruh, mencapai -9,33 persen, tetapi di sisi lain, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara masih mengalami pertumbuhan ekonomi positif sebesar 5,35 persen (BPS, 2022).

Salah satu masalah yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah ketimpangan pendapatan. Pertumbuhan ekonomi juga harus disertai dengan distribusi pendapatan yang merata. Ketika pertumbuhan ekonomi disertai dengan ketimpangan pendapatan yang tinggi, itu menjadi tidak bermakna karena pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati oleh semua segmen masyarakat. Salah satu ukuran yang umum digunakan untuk mengukur secara komprehensif ketimpangan pendapatan adalah menggunakan koefisien gini atau rasio gini (Pulakian *et al.*, 2021).

Pandemi Covid-19, yang telah memengaruhi dunia, tentu juga memengaruhi Indonesia. Pandemi ini tidak hanya mengganggu kondisi ekonomi, termasuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia, tetapi juga memperburuk ketimpangan pendapatan. Masyarakat yang paling langsung terkena dampak kebijakan PSBB adalah mereka dengan pendapatan rendah hingga menengah yang tidak dapat melakukan aktivitas konsumsi karena pendapatan mereka yang berkurang (Santoso & Mukhlis, 2021).

Data tentang ketimpangan pendapatan yang diukur menggunakan rasio gini dapat dilihat pada Gambar 2, di mana rasio gini sebelum Covid-19 pada tahun 2011 mengalami peningkatan, kemudian cenderung menurun hingga 2019. Terjadinya kasus Covid-19 menyebabkan peningkatan rasio gini hingga tahun 2021, mencapai 0,384. Ini berarti bahwa pandemi Covid-19 telah memengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia.



Sumber: BPS-Statistik Indonesia, 2023 (diolah)

Gambar 2. Rasio Gini Indonesia

Pertumbuhan ekonomi dapat memiliki dampak positif maupun negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Hal ini menyiratkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu memiliki dampak positif terhadap ketimpangan pendapatan; terkadang pertumbuhan ekonomi juga memiliki dampak negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Kuznets pertama kali mempublikasikan temuan penelitiannya tentang hubungan antara ketimpangan pendapatan dan

pertumbuhan ekonomi pada tahun 1955. Hipotesisnya menyatakan bahwa dalam tahap awal pembangunan, sebuah negara mengalami ketimpangan pendapatan (upah) yang relatif rendah namun meningkat. Ketimpangan akan meningkat karena produktivitas sektor pertanian jauh lebih rendah daripada sektor industri yang berkembang dan tumbuh. Kuznets berargumen bahwa selama pertumbuhan ekonomi berikutnya, setelah peningkatan awal dalam ketimpangan upah, dapat diharapkan penurunan dispersi upah karena pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke industri, serta kemajuan dalam modernisasi dan produktivitas pertanian. Hubungan yang dihasilkan mengambil bentuk U terbalik yang dikenal dalam ekonomi sebagai kurva Kuznets.

Suhendra *et al.* (2020) menunjukkan dalam penelitiannya bahwa dampak pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan adalah negatif. Menurut teori ekonomi, peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan penurunan ketimpangan pendapatan, karena pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi mencerminkan penambahan nilai tambah dalam sektor ekonomi, yang kemudian mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih besar menghasilkan peningkatan aktivitas di sektor ekonomi dan akibatnya menyerap tenaga kerja, yang menghasilkan pendapatan yang lebih merata.

Bouincha dan Karim (2018), dalam penelitiannya, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengurangi ketimpangan hanya ketika suatu negara telah mencapai tingkat perkembangan yang maju. Temuan mereka juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mengurangi ketimpangan melalui penerapan mekanisme redistribusi yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi semua lapisan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi yang memiliki hubungan positif dengan ketimpangan terjadi hanya di negara-negara berkembang.

Namun, Setyadi *et al.* (2022) menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi dalam negeri memiliki dampak negatif yang tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sementara investasi asing memiliki dampak positif yang tidak signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Selain itu, IPM dan rata-rata tahun sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dalam arah yang negatif.

Pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan peningkatan ketimpangan pendapatan terjadi karena pertumbuhan tersebut tidak disertai dengan penurunan ketimpangan pendapatan. Hal ini bergantung pada waktu yang diperlukan. Ketika pembangunan ekonomi bertujuan untuk redistribusi pendapatan, diperlukan waktu yang relatif lebih lama. Sebaliknya, dalam jangka waktu yang relatif lebih pendek, pembangunan ekonomi hanya ditujukan untuk pertumbuhan ekonomi, sehingga kemungkinan redistribusi pendapatan terjadi tinggi.

Kondisi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia telah menunjukkan tren fluktuatif. Beberapa provinsi menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh peningkatan ketimpangan pendapatan, sementara yang lain menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh penurunan ketimpangan pendapatan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami tingkat kesejahteraan yang tidak merata. Oleh karena itu, penelitian ini perlu diteliti lebih lanjut.

METODE PENELITIAN

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) serta sumber literatur lain yang relevan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi data panel. Periode penelitian berlangsung dari tahun 2010 hingga 2021 di 34 provinsi di Indonesia.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dan dimodifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Setyadi *et al.* (2022), dengan penambahan variabel *dummy* Covid-19. Tahun 2020 dan 2021 menandai era pandemi Covid-19, sedangkan periode dari tahun 2010 hingga 2019 menunjukkan waktu sebelum munculnya Covid-19. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan secara rinci dalam Tabel 1.

Tabel 1. Variabel Penelitian

No.	Variabel	Informasi
1	lgini	Indeks gini (x100) menjadi logaritma natural
2	growth	Pertumbuhan ekonomi adalah proksi dari PDRB per kapita yang diubah menjadi logaritma natural
3	lhdi	Indeks pembangunan manusia menjadi logaritma natural
4	lfdi	Investasi asing langsung menjadi logaritma natural
5	ldin	Investasi domestik menjadi logaritma natural
6	dc	<i>Dummy</i> Covid-19

Secara umum, model data panel dapat dituliskan sebagai berikut:

$$y_{it} = \alpha + \beta x_{it} + \varepsilon_{it} \dots (1)$$

Estimasi parameter dalam model data panel dapat dilakukan menggunakan teknik seperti *Pooled Least Squares* (PLS), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM) (Gujarati, 2021).

Model penelitian yang digunakan untuk menganalisis dampak Covid-19 dan pertumbuhan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia menggunakan kumpulan data *time-series* selama dua belas tahun mulai dari tahun 2010 hingga 2021, bersama dengan data *cross-sectional* yang mencakup 34 provinsi di Indonesia. Variabel yang digunakan dalam studi ini diadaptasi dan dimodifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Setyadi *et al.* (2022), dengan penambahan variabel *dummy* Covid-19. Berikut adalah model yang digunakan dalam penelitian ini:

$$lgini_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 growth_{it} + \alpha_2 growth_{it} dc_{it} + \alpha_3 growth_{it}^2 + \alpha_4 growth_{it}^2 dc_{it} + \alpha_5 lhdi_{it} + \alpha_6 lhdi_{it} dc_{it} + \alpha_7 lfdi_{it} + \alpha_8 lfdi_{it} dc_{it} + \alpha_9 ldin_{it} + \alpha_{10} ldin_{it} dc_{it} + \varepsilon_{it} \dots (2)$$

Model tersebut digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebelum dan pada saat Covid-19. Persamaan 2 ditulis ulang sebagai berikut:

- **Sebelum Covid-19 ($dc_{it} = 0$)**

$$lgini_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 growth_{it} + \alpha_2 growth_{it} dc_{it}(0) + \alpha_3 growth_{it}^2 + \alpha_4 growth_{it}^2 dc_{it}(0) + \alpha_5 lhdi_{it} + \alpha_6 lhdi_{it} dc_{it}(0) + \alpha_7 lfdi_{it} + \alpha_8 lfdi_{it} dc_{it}(0) + \alpha_9 ldin_{it} + \alpha_{10} ldin_{it} dc_{it}(0) + \varepsilon_{it} \dots (3)$$

$$lgini_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 growth_{it} + \alpha_3 growth_{it}^2 + \alpha_5 lhdi_{it} + \alpha_7 lfdi_{it} + \alpha_9 ldin_{it} + \varepsilon_{it} \dots (4)$$

- **Selama Covid-19 ($dc_{it} = 1$)**

$$\begin{aligned}
l\text{gini}_{it} &= \alpha_0 + \alpha_1\text{growth}_{it} + \alpha_2\text{growth}_{it}dc_{it}(1) + \alpha_3\text{growth}_{it}^2 + \\
&\quad \alpha_4\text{growth}_{it}^2dc_{it}(1) + \alpha_5\text{lhdi}_{it} + \alpha_6\text{lhdi}_{it}dc_{it}(1) + \alpha_7\text{lfdi}_{it} + \\
&\quad \alpha_8\text{lfdi}_{it}dc_{it}(1) + \alpha_9\text{ldin}_{it} + \alpha_{10}\text{ldin}_{it}dc_{it}(1) + \varepsilon_{it} \dots(5) \\
l\text{gini}_{it} &= \alpha_0 + (\alpha_1 + \alpha_2)\text{growth}_{it} + (\alpha_3 + \alpha_4)\text{growth}_{it}^2 + (\alpha_5 + \alpha_6)\text{lhdi}_{it} + (\alpha_7 + \\
&\quad \alpha_8)\text{lfdi}_{it} + (\alpha_9 + \alpha_{10})\text{ldin}_{it} + \varepsilon_{it} \dots(6)
\end{aligned}$$

Signifikansi dari of α_2 , α_4 , α_6 , α_8 , and α_{10} menentukan apakah ada perbedaan dalam pengaruh variabel independen terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan pertumbuhan ekonomi, karena peningkatan pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan meningkatkan pendapatan orang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pertumbuhan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk mendapatkan output tambahan, dengan indikator menggunakan PDB atau PDRB dalam suatu wilayah. PDRB per kapita adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan sosial.

Provinsi dengan PDRB per kapita tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar Rp174,81 juta, sedangkan provinsi dengan PDRB per kapita terendah adalah NTT sebesar Rp12,76 juta. Perbedaan PDRB per kapita antara kedua provinsi tersebut adalah Rp162,05 juta. Rata-rata PDRB per kapita di seluruh provinsi adalah Rp43,64 juta. Selama pandemi, beberapa wilayah mengalami penurunan PDRB per kapita, termasuk DKI Jakarta, dengan PDRB per kapita sebesar Rp170,10 juta. Sementara itu, provinsi dengan PDRB per kapita terendah tetap Papua sebesar Rp12,96 juta. Dengan demikian, provinsi NTT terkena dampak pandemi. Rasio antara PDRB per kapita tertinggi dan terendah secara keseluruhan adalah 13,12 kali.

Setelah dilaksanakannya Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), dapat dikatakan berhasil meningkatkan PDRB per kapita di setiap provinsi. Provinsi dengan PDRB per kapita tertinggi tetap DKI Jakarta sebesar Rp174,96 juta. Sementara itu, provinsi dengan PDRB per kapita terendah masih NTT dengan nilai Rp13,09 juta. Rasio antara PDRB per kapita tertinggi dan terendah secara keseluruhan adalah 13,36 kali. Meskipun provinsi NTT memiliki PDRB per kapita terendah, PDRB per kapita mereka telah meningkat dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi menjadi kebijakan tujuan utama, karena banyak langkah untuk mengatasi masalah sosial dan kemiskinan dapat diatasi dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat adalah salah satu prasyarat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Di Tabel 2, provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi adalah Sulawesi Tengah sebesar 8,83 persen, sedangkan provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Papua sebesar -15,74 persen. Rata-rata pertumbuhan ekonomi di seluruh provinsi adalah 4,68 persen. Selama pandemi, provinsi Maluku Utara menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 5,35 persen, sementara provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah adalah Bali sebesar -9,33 persen.

Pertumbuhan ekonomi telah meningkat di beberapa wilayah setelah program PC-PEN. Wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi masih provinsi Maluku Utara sebesar 16,40 persen. Sementara itu, provinsi dengan pertumbuhan ekonomi terendah masih Bali dengan nilai -2,47 persen. Kebijakan PC-PEN yang dilaksanakan dapat dianggap berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi. Wilayah dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi terbaik adalah provinsi Papua dengan rasio perbandingan sebesar 12,72 persen diikuti oleh beberapa provinsi lainnya..

Tabel 2. Perkembangan PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Provinsi	PDRB per kapita (juta rupiah)					Pertumbuhan ekonomi (persen)				
	2019	2020	2021	%Δ 2020	%Δ 2021	2019	2020	2021	Δ 2020	Δ 2021
AC	24,84	25,02	25,36	0,71	1,36	4,14	-0,37	2,79	-4,51	3,16
SU	36,85	36,18	36,67	-1,84	1,36	5,22	-1,07	2,61	-6,29	3,68
SB	31,43	30,69	31,36	-2,33	2,17	5,01	-1,62	3,29	-6,63	4,91
RI	72,51	76,88	77,99	6,03	1,44	2,81	-1,13	3,36	-3,94	4,49
JA	41,81	41,95	42,92	0,34	2,31	4,35	-0,44	3,66	-4,79	4,10
SS	37,13	37,32	38,17	0,53	2,28	5,69	-0,11	3,58	-5,80	3,69
BE	23,50	23,11	23,53	-1,70	1,85	4,94	-0,02	3,24	-4,96	3,26
LA	28,89	26,74	27,20	-7,44	1,70	5,26	-1,67	2,79	-6,93	4,46
BB	37,17	36,30	37,58	-2,34	3,52	3,32	-2,30	5,05	-5,62	7,35
KR	81,14	85,01	85,43	4,77	0,49	4,83	-3,80	3,43	-8,63	7,23
JK	174,81	170,10	174,96	-2,70	2,86	5,82	-2,39	3,56	-8,21	5,95
JB	30,41	30,18	30,91	-0,77	2,41	5,02	-2,52	3,74	-7,54	6,26
JT	28,70	26,48	27,14	-7,71	2,49	5,36	-2,65	3,32	-8,01	5,97
YO	27,01	27,75	28,90	2,75	4,15	6,59	-2,68	5,53	-9,27	8,21
JI	41,51	39,69	40,83	-4,39	2,88	5,53	-2,33	3,57	-7,86	5,90
BT	35,91	37,16	38,20	3,48	2,78	5,26	-3,39	4,44	-8,65	7,83
BA	37,30	34,22	32,98	-8,25	-3,64	5,60	-9,33	-2,47	-14,93	6,86
NB	18,22	17,58	17,71	-3,49	0,70	3,90	-0,62	2,30	-4,52	2,92
NT	12,76	12,96	13,09	1,56	1,01	5,25	-0,84	2,51	-6,09	3,35
KB	27,20	24,95	25,81	-8,26	3,42	5,09	-1,82	4,78	-6,91	6,60
KT	37,87	37,15	37,86	-1,91	1,91	6,12	-1,41	3,40	-7,53	4,81
KS	31,61	32,21	32,85	1,90	1,97	4,09	-1,82	3,48	-5,91	5,30
KI	134,41	125,81	127,17	-6,40	1,08	4,70	-2,87	2,48	-7,57	5,35
KU	88,30	86,82	88,51	-1,67	1,94	6,89	-1,09	3,98	-7,98	5,07
SA	35,69	33,67	34,79	-5,65	3,32	5,65	-0,99	4,16	-6,64	5,15
ST	42,05	45,05	49,59	7,13	10,07	8,83	4,86	11,70	-3,97	6,84
SN	37,47	36,25	37,57	-3,28	3,66	6,91	-0,71	4,65	-7,62	5,36
SG	35,31	35,71	36,58	1,13	2,44	6,50	-0,65	4,10	-7,15	4,75
GO	24,17	24,31	24,65	0,60	1,38	6,40	-0,02	2,41	-6,42	2,43
SR	24,16	22,65	22,88	-6,25	1,00	5,56	-2,40	2,56	-7,96	4,96
MA	17,56	16,69	17,02	-4,95	1,99	5,41	-0,92	3,04	-6,33	3,96
MU	21,52	21,91	25,10	1,77	14,60	6,25	5,35	16,40	-0,90	11,05
PB	64,42	54,49	52,98	-15,42	-2,77	2,66	-0,76	-0,51	-3,42	0,25
PA	40,20	32,11	36,42	-20,13	13,42	-15,74	2,39	15,11	18,13	12,72
Maks	174,81	170,10	174,96	7,13	14,60	8,83	5,35	16,40	18,13	12,72
Min	12,76	12,96	13,09	-20,13	-3,64	-15,74	-9,33	-2,47	-14,93	0,25
Rasio	13,70	13,12	13,36							
Rata-rata	43,64	42,50	43,55							

Sumber: BPS-Statistik Indonesia, 2023 (diolah)

Rasio gini berfungsi sebagai ukuran numerik ketimpangan pendapatan yang berkisar dari 0 hingga 1. Ketimpangan pendapatan rendah jika rasio gini kecil atau mendekati nol, sedangkan rasio gini yang lebih tinggi, mendekati 1, menunjukkan ketimpangan pendapatan yang lebih besar (Putra & Lisna, 2020). Selain itu, Tabel 3 menyajikan rasio gini di Indonesia. Sebelum pandemi Covid-19, provinsi dengan rasio gini tertinggi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,42, sedangkan provinsi dengan rasio gini terendah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 0,26. Rasio gini rata-rata nasional adalah 0,35. Rasio antara rasio gini terendah dan tertinggi adalah 1,56 kali lipat. Selama pandemi, Daerah Istimewa Yogyakarta tetap menjadi provinsi dengan rasio gini tertinggi sebesar 0,43, sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempertahankan posisinya sebagai provinsi dengan rasio gini terendah sebesar 0,26. Rasio antara rasio gini tertinggi dan terendah meningkat menjadi 1,66 kali lipat, dengan rata-rata 0,35.

Setelah implementasi kebijakan PC-PEN, beberapa provinsi di Indonesia mengalami penurunan rasio gini. Pada tahun 2021, provinsi dengan rasio gini tertinggi tetap Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 0,44, sementara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempertahankan posisinya sebagai provinsi dengan rasio gini terendah sebesar 0,26. Rasio

gini rata-rata nasional tetap pada 0,35. Provinsi dengan peningkatan nilai gini tertinggi adalah Provinsi Jawa Tengah, dengan peningkatan sebesar 2,76 persen, sementara provinsi dengan penurunan nilai gini adalah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan penurunan -3,07 persen dan rasio 1,72 kali lipat.

Tabel 3. Perkembangan Rasio Gini Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19 di Indonesia

Provinsi	Rasio Gini				
	2019	2020	2021	%Δ 2020	%Δ 2021
AC	0.320	0.323	0.324	0.938	0.310
SU	0.320	0.316	0.314	-1.250	-0.633
SB	0.310	0.305	0.306	-1.613	0.328
RI	0.330	0.329	0.326	-0.303	-0.912
JA	0.320	0.320	0.321	0.000	0.313
SS	0.330	0.339	0.341	2.727	0.590
BE	0.340	0.334	0.326	-1.765	-2.395
LA	0.330	0.327	0.323	-0.909	-1.223
BB	0.270	0.262	0.256	-2.963	-2.290
KR	0.340	0.339	0.343	-0.294	1.180
JK	0.390	0.399	0.409	2.308	2.506
JB	0.400	0.403	0.412	0.750	2.233
JT	0.360	0.362	0.372	0.556	2.762
YO	0.420	0.434	0.441	3.333	1.613
JI	0.370	0.366	0.374	-1.081	2.186
BT	0.370	0.363	0.365	-1.892	0.551
BA	0.370	0.369	0.378	-0.270	2.439
NB	0.380	0.376	0.381	-1.053	1.330
NT	0.360	0.354	0.346	-1.667	-2.260
KB	0.330	0.317	0.313	-3.939	-1.262
KT	0.340	0.329	0.323	-3.235	-1.824
KS	0.330	0.332	0.330	0.606	-0.602
KI	0.330	0.328	0.334	-0.606	1.829
KU	0.300	0.292	0.292	-2.667	0.000
SA	0.370	0.370	0.365	0.000	-1.351
ST	0.330	0.326	0.316	-1.212	-3.067
SN	0.390	0.389	0.382	-0.256	-1.799
SG	0.400	0.389	0.390	-2.750	0.257
GO	0.410	0.408	0.408	-0.488	0.000
SR	0.370	0.364	0.356	-1.622	-2.198
MA	0.320	0.318	0.314	-0.625	-1.258
MU	0.310	0.308	0.300	-0.645	-2.597
PB	0.390	0.382	0.380	-2.051	-0.524
PA	0.390	0.392	0.397	0.513	1.276
Maks	0.420	0.434	0.441	3.333	2.762
Min	0.270	0.262	0.256	-3.939	-3.067
Rasio	1.556	1.656	1.723		
Rata-rata	0.351	0.349	0.349		

Sumber: BPS-Statistik Indonesia, 2023 (diolah)

Tabel 4 menyajikan ringkasan variabel dimulai dari variabel gini, di mana terdapat masalah kekurangan data yang disebabkan oleh sampel data yang hilang yang diunggah oleh BPS. Kekurangan ini disebabkan oleh periode dari tahun 2010 hingga 2014 ketika Provinsi Kalimantan Utara belum dibentuk, sehingga hanya terdapat 403 observasi untuk variabel gini. Nilai rata-rata dari variabel ini mencapai skala 0,363, dengan nilai minimum dipegang oleh Provinsi Bangka Belitung pada tahun 2021 dengan skala 0,256, dan nilai maksimum dipegang oleh Provinsi Gorontalo pada tahun 2011 dengan skala 0,459. Selanjutnya, variabel PDRB per kapita hanya mencapai 405 observasi karena keterbatasan data dari lembaga survei. Nilai rata-rata untuk variabel PDRB per kapita adalah Rp3,8 juta, dengan nilai minimum terjadi di

Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2010 sebesar Rp9,3 juta dan nilai maksimum dipegang oleh Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021 sebesar Rp174 juta.

Variabel HDI juga menghadapi kekurangan data, dengan hanya 405 observasi karena pendirian baru Provinsi Kalimantan Utara di Indonesia. Hal ini menyebabkan keterbatasan data untuk variabel HDI, terutama di Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2010 hingga 2012. Nilai rata-rata untuk variabel HDI mencapai skala 68,80, dengan nilai minimum pada skala 54,45 di Provinsi Papua pada tahun 2010 dan nilai maksimum pada skala 81,11 di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2021. Selain itu, variabel investasi langsung asing (FDI) juga mengalami masalah kekurangan data, dengan hanya 405 observasi karena keterbatasan data dari lembaga survei. Nilai rata-rata untuk variabel FDI adalah \$8,03 juta, dengan nilai minimum terjadi di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2012 sebesar \$0,2 juta dan nilai maksimum dipegang oleh Provinsi Jawa Barat pada tahun 2013 sebesar \$7124 juta.

Variabel investasi dalam negeri (DIN) menghadapi masalah kekurangan data yang disebabkan oleh sampel data yang hilang yang diunggah oleh BPS. Hal ini disebabkan oleh Provinsi Bengkulu pada tahun 2011, Provinsi Kalimantan Utara dari tahun 2010 hingga 2012, Provinsi Maluku dari tahun 2010 hingga 2015, dan Provinsi Maluku Utara pada tahun 2010, yang menyebabkan keterbatasan data dan hanya terdapat 399 observasi untuk DIN. Nilai rata-rata untuk variabel DIN mencapai Rp6,88 triliun, dengan nilai minimum terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2010 sebesar Rp0,10 triliun dan nilai maksimum dipegang oleh Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2019 sebesar Rp62,09 triliun..

Tabel 4. Ringkasan Statistik

Variabel	Satuan	Obs.	Rata-rata	Std. Dev.	Min	Maks
gini	0-1	403	0.36	0.04	0.256	0.459
pdrb_k	juta rupiah	405	3.80	3.0	9.31	174
hdi	0-100	405	68.80	4.50	54.45	81.11
fdi	juta dollar	405	8.03	12.22	0.2	7.124
din	miliar rupiah	399	6.88	11.06	0.1	62.09

Sumber: BPS-Statistik Indonesia, 2023 (diolah)

Hasil Analisis Regresi Data Panel

Dalam analisis regresi data panel, tiga tes penting untuk menentukan pendekatan model terbaik yang akan digunakan dalam studi. Tes ini meliputi uji Chow, yang menentukan model optimal antara CEM atau FEM; uji Hausman, yang digunakan untuk memilih antara model FEM atau REM; dan uji *Lagrange Multiplier*, digunakan untuk menentukan model terbaik antara pendekatan REM dan CEM. Berdasarkan hasil uji Hausman dan *Lagrange*, dapat disimpulkan bahwa model estimasi yang disukai untuk analisis data panel dalam studi ini adalah pendekatan REM.

Analisis dari model yang dipilih, menggunakan regresi data panel dengan teknik REM, disajikan dalam Tabel 5. Interpretasi dari *R-squared* atau koefisien determinasi untuk model adalah 0,20. Nilai ini menunjukkan bahwa variabel independen dalam studi ini secara bersama-sama dapat menjelaskan 20 persen variasi variabel dependen. Karena nilai *R-squared* di bawah 0,5, itu mengimplikasikan bahwa sekitar 80 persen faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi mungkin menjelaskan dan memengaruhi variabel dependen. Selain itu, uji *Wald Chi²* menghasilkan hasil sebesar 88,04, yang menunjukkan bahwa variabel independen dalam setiap model tidak memiliki dampak signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Estimasi Model Data Panel

Variabel Independen	Variabel Dependen: IGINI
growth	-0.166 (0.151)
growth*dc	-0.156 (0.120)
growth ²	0.020 (0.020)
growth ² *dc	0.019 (0.016)
lhdi	-0.425*** (0.165)
lhdi*dc	0.108 (0.162)
lfdi	0.008** (0.004)
lfdi*dc	-0.004 (0.005)
ldin	-0.001 (0.002)
ldin*dc	0.005 (0.008)
dc	-0.190 (0.702)
constant	5.681*** (0.640)
R-squared (R ²)	0.202
Wald Chi ²	88.04
Num. of Observations	397
Province	34
Model Selection Criteria	
• Chow Test	FEM
• Hausman Test	REM
• LM Test	REM
Decision	REM

Catatan *** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,1; tanda kurung adalah *standard error*

Tabel 5 dapat disusun kembali menjadi Tabel 6 untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dampak variabel independen terhadap variabel dependen baik sebelum maupun saat Covid-19.

Tabel 6. Hasil Estimasi Model Data Panel Sebelum dan Selama Covid-19

Variabel Independen	Koefisien	
	Sebelum Covid-19 (dc=0)	Selama Covid-19 (dc=1)
growth	-	-
growth ²	-	-
lnhdi	-0.425	-0.425
lfdi	0.008	0.008
ldin	-	-

Variabel Terikat: IGINI

Sumber: BPS-Statistik Indonesia, 2023 (diolah)

Secara parsial, hasil uji regresi menunjukkan tidak adanya hubungan signifikan antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan sebelum atau selama pandemi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi mencerminkan peningkatan nilai tambah dalam ekonomi, yang kemudian mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi mendorong aktivitas sektor ekonomi yang lebih besar dan penciptaan lapangan kerja, yang pada akhirnya mengarah pada distribusi pendapatan yang lebih merata. Namun, dalam kasus provinsi-provinsi di Indonesia, pertumbuhan ekonomi memiliki dampak terbatas pada masyarakat (Suhendra et al., 2020). Salah satu penyebab disparitas ekonomi adalah akses

terbatas terhadap infrastruktur dan fasilitas bagi penduduk. Kondisi ini menimbulkan tantangan untuk meningkatkan, menyamakan, dan memperluas akses serta kualitas layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial lainnya, serta penyebaran informasi ke semua wilayah (Andiny & Mandasari, 2017). Temuan studi ini sejalan dengan penelitian Pangkiro (2016), yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diamati belum secara efektif mengatasi disparitas yang ada. Pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh sektor padat karya hanya memberikan kontribusi minimal, sementara sektor dengan jumlah tenaga kerja yang substansial tetap menjadi kontributor yang tidak memadai terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada tahap awal pembangunan, distribusi pendapatan cenderung memburuk sebelum membaik, tetapi pada akhirnya, ada kebangkitan disparitas, yang digambarkan oleh kurva Kuznets yang berbentuk U terbalik. Ini terkait dengan perubahan struktural fundamental. Dengan peningkatan koefisien gini per kapita, ini menunjukkan korelasi positif jangka pendek antara pertumbuhan pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan. Namun, dalam jangka panjang, hubungan tersebut berubah menjadi negatif, yang berarti bahwa seiring pertumbuhan ekonomi meningkat, ketimpangan pendapatan tidak. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi tidak selalu memperluas ketimpangan (Mansyur, dkk., 2021). Studi ini bertentangan dengan teori kurva Kuznets, karena tidak diamati berlaku untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kuznets mengusulkan bahwa pertumbuhan ekonomi terutama terlihat di negara-negara maju (Hendarmin, 2019). Selain itu, studi ini kurang memiliki waktu yang cukup untuk memvalidasi hipotesis Kuznets di negara-negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi biasanya diamati dalam jangka panjang, berkisar antara 10 hingga 50 tahun atau lebih (Boediono, 2012).

Menurut model Lewis, tahap pertumbuhan awal terkonsentrasi dalam sektor industri modern dengan peluang kerja yang terbatas tetapi upah dan produktivitas yang relatif tinggi. Kurva Kuznets dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan yang berkelanjutan yang mengubah negara dari ekonomi tradisional menjadi modern, bersamaan dengan ekspansi sektor modern. Selain itu, pengembalian investasi di sektor pendidikan mungkin awalnya meningkat karena permintaan tenaga kerja terampil di sektor modern yang muncul. Namun, pengembalian tersebut mungkin berkurang seiring dengan peningkatan pasokan tenaga kerja terdidik dan penurunan pasokan tenaga kerja tidak terampil (Putri *et al.*, 2015).

Hasil analisis regresi menunjukkan hubungan signifikan antara variabel HDI dan ketimpangan pendapatan, dengan efek yang konsisten diamati baik sebelum maupun selama periode pandemi. Ini menunjukkan bahwa peningkatan HDI mengarah pada penurunan ketimpangan pendapatan. Secara khusus, peningkatan satu persen dalam HDI terkait dengan penurunan 0,425 persen dalam ketimpangan pendapatan.

Penelitian sebelumnya oleh Hindun *et al.* (2017) menyarankan bahwa tingkat pendidikan memainkan peran penting dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Disparitas pendapatan muncul karena interaksi antara kemampuan, pendidikan, dan perbedaan dalam kualitas pendidikan. Akses terbatas terhadap pendidikan menghambat peluang pendapatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, investasi pemerintah dalam pendidikan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan.

Pendidikan berfungsi sebagai investasi dalam meningkatkan sumber daya manusia. Melalui pendidikan, keterampilan dan produktivitas kerja dapat ditingkatkan, dengan demikian secara langsung berkontribusi pada pertumbuhan pendapatan nasional melalui peningkatan keahlian dan produktivitas kerja. Pembangunan ekonomi yang tertinggal dapat diatasi melalui pendidikan dengan meningkatkan kualitas manusia (Arniwita *et al.*, 2020). Pendidikan merupakan bentuk modal manusia yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia. Pendekatan modal manusia berfokus pada kemampuan tidak langsung untuk meningkatkan utilitas dengan meningkatkan pendapatan. Investasi dalam modal manusia menghasilkan

manfaat yang tinggi ketika membandingkan total biaya pendidikan yang dikeluarkan selama masa sekolah dengan pendapatan yang diperoleh setelah memasuki pasar kerja. Individu dengan pendidikan yang lebih tinggi mungkin memulai pekerjaan penuh waktu pada usia yang lebih tua, tetapi pendapatan mereka naik dengan cepat dibandingkan dengan mereka yang memulai bekerja lebih awal (Sari *et al.*, 2021).

Menurut Seran (2017), pendidikan adalah cara yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, yang terbukti melalui indikator seperti rata-rata tahun sekolah, mencerminkan tingkat pendidikan yang dicapai oleh sebuah komunitas. Durasi sekolah rata-rata yang lebih tinggi menandakan tingkat pendidikan individu yang lebih tinggi, umumnya berkorelasi dengan kualitas yang lebih tinggi dalam pola pikir dan tindakan.

Teori modal manusia mengemukakan bahwa pendidikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi disparitas pendapatan. Faktor-faktor seperti kesehatan dan pendidikan dapat mengurangi disparitas yang ada. Peningkatan kualitas sumber daya manusia menyebabkan peningkatan pendapatan per kapita, terutama di kalangan kelompok berpenghasilan rendah, yang pada gilirannya mengurangi ketimpangan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia mengindikasikan kemajuan positif dalam pembangunan ekonomi regional. Dengan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, komunitas dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan kesehatan yang lebih baik, sehingga mengubah kehidupan mereka secara positif dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, peningkatan kualitas HDI akan meningkatkan pendapatan per kapita regional dan mengurangi ketimpangan pendapatan (Nita, 2017).

Awal mula pandemi pada akhir 2019 mengganggu kondisi ekonomi Indonesia. Mengingat biaya pendidikan yang meningkat, komunitas miskin mungkin mencapai tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan yang kaya, menyebabkan disparitas dalam kualitas pendidikan. Hal ini memperkuat peran penting pendidikan dalam tingkat gaji atau pendapatan, karena disparitas ini berkontribusi pada ketimpangan pendapatan. Distribusi HDI yang tidak merata di antara wilayah mengakibatkan beberapa daerah menjadi relatif maju karena kualitas sumber daya manusia yang lebih baik, sementara yang lain tertinggal karena sumber daya manusia yang inferior. Ketidakseimbangan ini memicu pembangunan yang tidak merata. Jika dibiarkan, disparitas pendapatan regional akan semakin melebar (Nadya & Syafri, 2019).

Individu dengan pendidikan tinggi cenderung mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi, namun banyak lulusan perguruan tinggi yang tetap menganggur. Pengangguran berasal dari peluang kerja yang terbatas, dengan pencari kerja menunggu posisi yang sesuai dengan keterampilan mereka. Pengangguran menghilangkan pendapatan individu, memperburuk ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, ada kebutuhan akan modal manusia yang berkualitas, salah satunya dicapai melalui pendidikan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya pelebaran ketimpangan pendapatan (Anshari *et al.*, 2018).

Variabel FDI menunjukkan hubungan yang signifikan dengan ketimpangan pendapatan baik sebelum maupun selama pandemi Covid-19, namun tidak ada perbedaan yang jelas dalam pengaruh antara dua periode tersebut. Peningkatan satu persen dalam FDI sesuai dengan peningkatan 0,008 persen dalam ketimpangan pendapatan. Temuan ini sejalan dengan teori Harrod-Domar, yang menyarankan bahwa investasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Dapat disimpulkan bahwa Investasi Langsung Asing (FDI) secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dengan peningkatan FDI, pertumbuhan ekonomi diharapkan meningkat, sehingga mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Namun, dalam studi ini, FDI tampaknya memperburuk ketimpangan distribusi pendapatan. Fenomena ini mungkin terjadi karena aliran FDI pada dasarnya terdiri dari investasi berintensitas modal, yang menghasilkan penciptaan lapangan kerja yang terbatas dan tidak mampu mengangkat masyarakat melalui peluang kerja, sehingga memperburuk ketimpangan pendapatan (Najwa & Imamudin, 2020).

Hasil dari penelitian ini juga konsisten dengan temuan Hartati (2019) yang menyatakan bahwa FDI secara signifikan dan positif memengaruhi ketimpangan pendapatan. Hal ini dapat disebabkan oleh distribusi modal asing yang tidak merata, yang mengakibatkan disparitas pembangunan ekonomi yang meningkat di antara wilayah-wilayah. Faktor-faktor seperti infrastruktur yang tidak memadai di wilayah yang belum berkembang dapat menolak investor asing, menegaskan pentingnya infrastruktur pendukung untuk menarik investasi asing dan mendorong pembangunan ekonomi.

Variabel DIN tidak menunjukkan hubungan yang signifikan dengan ketimpangan pendapatan, baik sebelum maupun selama pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa DIN tidak berkontribusi pada penurunan ketimpangan pendapatan. Temuan ini sejalan dengan temuan Laut *et al.* (2020) dan Rinjani (2019), yang menyatakan bahwa investasi domestik tidak mempengaruhi ketimpangan pendapatan. Fenomena ini terjadi karena distribusi investasi yang tidak merata di setiap wilayah. Investor memberikan prioritas pada keuntungan, yang biasanya dicari di wilayah yang sudah berkembang. Selain itu, faktor-faktor seperti fasilitas dan akses memengaruhi keputusan investasi. Setiap wilayah harus memanfaatkan dan mengembangkan potensi ekonominya untuk menarik investor dan kemudian memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Keputusan investasi dibuat berdasarkan harapan keuntungan di masa depan, yang bergantung pada iklim investasi saat ini dan hasil aktual. Oleh karena itu, wilayah harus mampu mengeksplorasi dan mengembangkan potensi ekonominya untuk menarik investor dengan menawarkan keuntungan yang memuaskan dan pada akhirnya memberikan manfaat bagi penduduk lokal (Rizqullah, 2021).

KESIMPULAN

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak secara signifikan memengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia, baik sebelum maupun setelah Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis Kuznets tidak didukung di Indonesia. Selain itu, studi ini menunjukkan bahwa variabel HDI dan FDI secara signifikan memengaruhi ketimpangan pendapatan, tanpa perbedaan yang diamati dalam pengaruh mereka sebelum dan selama Covid-19. Variabel HDI memiliki dampak negatif pada ketimpangan pendapatan, yang berarti peningkatan HDI menyebabkan penurunan ketimpangan pendapatan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, memfasilitasi peluang kerja yang lebih baik, peningkatan pelayanan kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan secara keseluruhan, yang kemudian meningkatkan pendapatan per kapita regional, dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Sebaliknya, variabel FDI memiliki efek positif pada ketimpangan pendapatan, karena peningkatan FDI memperburuk ketimpangan pendapatan akibat sifat modal intensif FDI, yang menyebabkan penciptaan lapangan kerja yang terbatas dan melebarkan kesenjangan pendapatan. Kedua variabel menunjukkan efek yang konsisten pada ketimpangan pendapatan tanpa memandang pandemi. Selain itu, variabel DIN tidak memengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia sebelum atau selama Covid-19.

Mengatasi ketimpangan pendapatan memerlukan peningkatan sumber daya manusia. Modal manusia mengacu pada pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh oleh pekerja melalui pendidikan. Pembangunan manusia memainkan peran kunci dalam kemampuan suatu bangsa untuk menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitasnya untuk pertumbuhan dan pembangunan yang berkelanjutan. Indikator seperti harapan hidup mengukur kesehatan, tingkat melek huruf dewasa dan rata-rata tahun sekolah mengukur pendidikan, dan daya beli mengukur standar hidup. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran di kalangan penduduk tentang pentingnya pendidikan sangat penting, karena pendidikan merupakan investasi dalam modal manusia, yang mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agbatogun, K. K., Oladeji, S. I., & Adegboye, A. A. (2021). Inequality and inclusive growth: validation of kuznets' hypothesis in African countries. *Hallmark University Journal of Management and Social Sciences*, 3(3), 111-122.
- Agusalim, L. (2016). Pertumbuhan ekonomi, ketimpangan pendapatan dan desentralisasi di Indonesia. *Kinerja*, 20 (1), 53–68.
- Agusalim, L., Anggraeni, L., & Pasaribu, S. H. (2022). The economy of Indonesia: Driven by physical or human capital?. *JEJAK: Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, 15(1), 10-28. <https://doi.org/10.15294/jejak.v15i1.34418>.
- Andiny, P., & Mandasari, P. (2017). Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi*, 1(2), 196-210. <https://doi.org/10.33059/jensi.v1i2.412>.
- Anshari, M., Azhar, Z., & Ariusn. (2018). Analisis pengaruh pendidikan, upah minimum provinsi dan belanja modal terhadap ketimpangan pendapatan di seluruh provinsi di Indonesia. *Eco Gen*, 1(3), 494-502. <http://dx.doi.org/10.24036/jmpe.v1i3.4990>.
- Arniwita, Veronica, D., & Sholeh, A. (2020). Determinan ketimpangan indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi. *Jurnal Manajemen dan Sains (J-MAS)*, 5(2), 227-230. <http://dx.doi.org/10.33087/jmas.v5i2.186>.
- Assidikiyah, N., Marseto, & Sishadiyati. (2021). Analisis potensi pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Timur (sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19). *Jambura Economic Education Journal*, 3(2), 102-115. <https://doi.org/10.37479/jeej.v3i2.1101>.
- Azwar, & Subekan, A. (2016). Analisis determinan kemiskinan di Sulawesi Selatan. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2(1), 1-25. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v2i1.36>.
- Boediono. (2012). *Teori pertumbuhan ekonomi*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Bouincha, M., & Karim, M. (2018). Income inequality and economic growth: an analysis using a panel data. *International Journal of Economics and Finance*, 10(5), 242-253. <https://doi.org/10.5539/ijef.v10n5p242>.
- Deaton, A. (2021). COVID-19 and global income inequality (No. w28392). National Bureau of Economic Research.
- Estuningtyas, R. D. (2018). Dampak globalisasi pada politik, ekonomi, cara berfikir dan ideologi serta tantangan dakwahnya. *Al-Munzir*, 11(2), 195-218. <http://dx.doi.org/10.31332/am.v11i2.1118>.
- Farrah, N., & Yuliadi, I. (2020). Determinan ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. *Prosiding UMY Grace*, 1(1), 129-140.
- Gujarati, D. N. (2021). *Essentials of econometrics*. Sage Publications. West Point, New York.
- Hartati, Y. S. (2019). Analisis disparitas wilayah antar provinsi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 10(1), 1-22. <https://doi.org/10.55049/jeb.v10i1.104>.
- Hartini, N. T. (2017). Pengaruh PDRB per kapita, investasi dan IPM terhadap ketimpangan pendapatan antar daerah di Provinsi DIY tahun 2011-2015. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 6(6), 530-539.
- Hendarmin. (2019). Dampak pertumbuhan ekonomi, aglomerasi, dan modal manusia terhadap ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Economics, Social, and Development Studies*, 6(2), 245-271. <https://doi.org/10.24252/ecc.v6i2.11186>.
- Hindun, Soejoto, A., & Hariyati. (2017). Pengaruh pendidikan, pengangguran, dan kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 8(3), 250-265. <http://dx.doi.org/10.26418/jebik.v8i3.34721>.

- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis pengangguran dan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika*, 18(2), 201-208. <https://doi.org/10.31294/jp.v17i2>.
- Kuo, S.W.Y., & Ranis, G. (1982). *The Taiwan success story: Rapid growth with improved distribution in The Republic of China, 1952-1979* (eBook ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429315213>
- Kuznets, S. (1955). Economic growth and income inequality. *The American Economic Review*, 45(1), 1-28.
- Laut, L. T., Putri, A. S., & Septiana, Y. (2020). Pengaruh PMA, PMD, TPAK, PDRB per kapita, Pengeluaran Pemerintah terhadap Disparitas Pendapatan Jawa. *Journal of Management & Business*, 3(2), 21-34. <https://doi.org/10.26877/sta.v3i2.7781>.
- Nadya, A., & Syafri. (2019). Pengaruh faktor pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran terhadap ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia. *Media Ekonomi*, 27(1), 37-52. <http://dx.doi.org/10.25105/me.v27i1.5300>.
- Oczki, J., Muszynska, J., & Wedrowska, E. (2017). Kuznets hypothesis of income inequality: Empirical evidence from EU. *Hradec Economic Days*, 7(1), 643-651. <http://repozytorium.umk.pl/handle/item/4909>.
- Pangkiro, H. A., Ch.Rotinsulu, D., & Wauran, P. (2016). Analisis pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan terhadap ketimpangan di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(1), 339-351.
- Pulakian, O. G., Naukoko, A. T., & Londa, A. T. (2021). Analisis pertumbuhan ekonomi terhadap distribusi pendapatan di kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(104), 44-55.
- Putra, R. F., & Lisna, V. (2020). Segitiga kemiskinan, pertumbuhan, ketimpangan (PGI TRIANGLE): pembangunan keuangan, pembangunan manusia dan ketimpangan pendapatan di Asia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 28(2), 77-89. <https://doi.org/10.14203/JEP.28.2.2020.77-89>.
- Putri, Y. E., Amar, S., & Aimon, H. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 3(6), 1-18.
- Rinjani, M. F. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan distribusi pendapatan di Indonesia tahun 2010-2016. Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Rizqullah, A. B. (2021). Determinan Ketimpangan Pendapatan di Kawasan Timur Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 9(2), 1-11.
- Santoso, F. D., & Mukhlis, I. (2021). Ketimpangan pendapatan dan faktor-faktor yang mempengaruhi pada masa sebelum dan pada saat pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Pendidikan*, 1(2), 146-162. <https://doi.org/10.17977/um066v1i22021p146-162>.
- Sari, Y., Soleh, A., & Wafiaziza, W. (2021). Analisis pengaruh pendidikan dan penduduk miskin terhadap ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi. *Jurnal Development*, 9(2), 169-180.
- Seran, S. (2017). Hubungan antara pendidikan, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi dengan kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 10(1), 59-71. <https://doi.org/10.24843/JEKT.2017.v10.i01.p07>.
- Setyadi, S., Indriyani, L., & Resmawati, R. T. (2022). Estimating the impact of social and economic factors on income inequality in Indonesia. *Buletin Studi Ekonomi*, 27(1), 53-63. <https://doi.org/10.24843/BSE.2022.v27.i01.p06>.
- Suhendra, I., Istikomah, N., Ginanjar, R. A., & Anwar, C. J. (2020). Human capital, income inequality and economic variables: a panel data estimation from a region in Indonesia.

- Journal of Asian Finance, Economics and Business, 7(10), 571-579.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.571>.
- Suhendra, I., Istikomah, N., Ginanjar, R. A., & Anwar, C. J. (2020). Human capital, income inequality and economic variables: a panel data estimation from a region in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 571-579.
<https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.571>.
- Teeramungcalanon, M., & Chiu, E. M. (2020). The effects of foreign direct investment on income inequality of Thailand. *Southeast Asian Journal of Economics*, 8(1), 107-138.
- Widiastuti, A. (2021). Dampak pandemi Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 11(1), 97-107. <http://dx.doi.org/10.35448/jequ.v11i1.11278>.
- Younsi, M., & Bechtini, M. (2020). Economic growth, financial development, and income inequality in BRICS countries: does Kuznets' inverted U-shaped curve exist?. *Journal of the Knowledge Economy*, 11(2), 721-742. <https://doi.org/10.1007/s13132-018-0569-2>.